

**PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN KUALITAS
PENDIDIKAN DI SDN 014 KEMPAS JAYA KECAMATAN KEMPAS
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR RIAU**

Siti Arbi

sitiarbi@yahoo.com

Hadi Susanto

Esa Wahyu Endarti

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study aims to identify and describe the role of the school committee in improving the quality of education at SDN 014 Kempas Jaya, Kempas District, Indragiri Hilir Regency, Riau. This study uses a qualitative approach to the type of phenomenological research. Sources of data used as sources of information are the head of the School Committee, the Principal, and teachers. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation. Based on the results of research on the role of school committees in improving the quality of education at SDN 014 Kempas Jaya, Kempas District, Indragiri Hilir Regency, Riau includes: (1) considerations (advisory agency) in determining and implementing education policies at the education unit level; (2) supporting agencies in the form of finance, thoughts and personnel in the implementation of education in education units; (3) controlling agencies in the context of transparency and accountability for the implementation and output of education in education units; (4) mediators between schools with the community in the education unit.

Keywords: school committee, quality of education

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 014 Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Sumber data yang dijadikan sumber informasi adalah ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, dan guru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan diSDN 014 Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau meliputi: (1) pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan; (2)pendukung (*supporting agency*) baik yang berujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;(3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparan dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;(4) mediator antara sekolah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Kata kunci : komite sekolah, mutu pendidikan

PENDAHULUAN

Di dalam lembaga pendidikan, seorang pemimpin benar-benar harus dipersiapkan dan dipilih secara selektif, mengingat peran yang dimainkan pemimpin dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan organisasi. Maju mundurnya lembaga pendidikan lebih ditentukan oleh faktor pimpinan daripada faktor lain. Memang ada keterlibatan faktor-faktor lain dalam memberikan kontribusi kemajuan lembaga atau kemunduran suatu lembaga, tetapi posisi pemimpin masih merupakan faktor yang paling kuat dan paling menentukan nasib kedepan dari suatu lembaga pendidikan.

Begitu pentingnya peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan seakan memaksa masyarakat yang selama ini pasif terhadap pendidikan ditantang untuk lebih aktif dan partisipatif sebagai penanggung jawab pendidikan. Tanggung jawab pendidikan tidak hanya sekedar menyumbangkan dana untuk pembangunan gedung ataupun membayar uang sekolah saja tetapi lebih dari semua itu masyarakat diminta untuk lebih partisipatif dalam hal-hal kependidikan yang lain secara khusus, pemerintah mendukung adanya peran serta masyarakat dalam membangun pendidikan dengan dikeluarkannya UU Nomor 25 Tahun 2000 serta SK Mendiknas No. 044/U/2002 pada tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan. Upaya pemerintah untuk peningkatan mutu, pemerataan efisiensi

penyelenggaraan pendidikan nasional perlu dukungan dari semua *stakeholder*, mengingat masalah pendidikan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah disebutkan bahwa Komite Sekolah mempunyai peran : (1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan (2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan (3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan (4) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Jika Komite Sekolah sudah dapat melaksanakan keempat perannya dengan baik, maka diasumsikan bahwa Komite Sekolah tersebut dapat memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan. Untuk mengetahui sejauh mana peran Komite Sekolah di SDN 011 Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu yang dilihat dari indikator monitoring kinerja komite sekolah.

TINJAUAN TEORETIS

Pengertian Komite Sekolah

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 22 April 2002 dijelaskan bahwa: Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Komite sekolah merupakan forum pengambilan keputusan bersama antara sekolah dan

masyarakat dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh sekolah.

dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 56 ayat 2). Pada dasarnya Komite Sekolah lahir dari kebutuhan-kebutuhan pendidikan akan partisipasi masyarakat. Keluarga, Sekolah, dan masyarakat memiliki pola hubungan yang sangat rapat dan seharusnya bersatu padu secara sinergis dalam melaksanakan misi mencerdaskan bangsa. Bila dahulu kita mengenal Badan Orang Tua Murid dan Guru (POMG), dan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3), maka sebagai penyempurna institusi tersebut, sekarang telah ditemukan bentuknya yang lebih ideal, yaitu Komite Sekolah. Meski peran BP3 memang tidak hanya dalam aspek pemberian bantuan dalam bidang finansial atau keuangan, tetapi dalam praktik di lapangan peran BP3 memang terbatas kepada peran finansial saja. Bahkan peran inilah yang menjadi stigma yang melekat pada BP3. Komite Sekolah selain merupakan lembaga independen, juga mempunyai peran dan aspek yang lebih luas dari sekadar penggalang dana. Komite Sekolah ini secara formal difungsikan sebagai pengambil keputusan bersama antara sekolah dan masyarakat dalam hal perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi program kerja yang dilakukan oleh Sekolah.

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah adalah : (a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan (b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan (c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan dan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Atas dasar untuk pemberdayaan masyarakat itulah, maka digulirkan konsep Komite Sekolah sebagaimana dikemukakan di atas selanjutnya peran serta Komite Sekolah secara lebih tegas disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Baik Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah, mereka berperan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan sebagai mediator.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan Sekolah adalah : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Sekolah Ibtidaiyah, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 358 Tahun 1993 tentang Sekolah Tsanawiyah, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 tahun 1993 tentang Sekolah Aliyah.

Pengertian Tentang Mutu Pendidikan

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia "Mutu", berarti karat. Baik buruknya sesuatu, kualitas, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan). Mutu merupakan suatu gagasan yang dinamis, tidak mutlak. Mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu produk atau hasil kerja, baik berupa barang maupun jasa. Barang dan jasa pendidikan itu bermakna dapat dilihat dan tidak dapat dilihat. tetapi dapat dirasakan. Pengertian mutu secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang menyeluruh dari barang-barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam

memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.

Aspek-aspek Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk mewujudkan generasi yang bermutu diperlukan peningkatan mutu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu diperhatikan beberapa hal pokok, yaitu : Masalah kurikulum, Peningkatan efisiensi dan Efektivitas proses belajar mengajar, Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, Peningkatan kemampuan profesional dan kesejahteraan guru atau tenaga kependidikan lainnya, Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan sehingga tercipta peran dan tanggung jawab sekolah, pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif dan masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan hubungan alami antara peneliti dan informan. Fokus penelitian ini adalah sejauh mana keberhasilan Komite Sekolah di SDN 014 Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan serta menjalankan perannya guna meningkatkan mutu pendidikan di SDN 014 Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau sesuai dengan harapan masyarakat dan sebagai penyelenggara pendidikan dasar.

Pada penelitian ini penulis ingin mendapatkan hasil secara spesifik tentang efektifitas peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 014 Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu teknik pengambilan sampel secara selektif. Jenis

data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: tempat penelitian, informan dan dokumen.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah: Kepala Sekolah, Komite Sekolah yang meliputi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota dan para GuruSDN 014 Kempas Jaya Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Teknik pengumpul data pada penelitian ini menggunakan: analisis dokumen, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite sekolah diharapkan menjadi wadah pemecahan masalah bersama yang dihadapi penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan dan komitesekolah saling bekerja sama secara sinergis untuk membangun kualitas pelayanan pendidikan. Peran dan dukungan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menentukan kebijakan dan program sekolah. Dengan diberlakukannya otonomi pendidikan seperti sekarang ini, penyelenggaraan pendidikan di sekolah memerlukan prinsip keterbukaan, demokratis, tercapainya hasil daya guna cepattanggap partisipasi berwawasan ke depan, penegakan hukum, akuntabilitas, keadilan dan profesionalisme.

Komite sekolah berperan menjembatani kepentingan di antara masyarakat dan penyelenggara pendidikan. Komite sekolah diharapkan mampu membantu kinerja kepala sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Komite sekolah merupakan penyempurnaan dan perluasan dari badan kemitraan dan komunikasi antar sekolah dengan masyarakat. Mitra sekolah hanya terbatas dengan orang tua peserta didik dalam wadah yang disebut dengan POMG (Persaiuan orang Tua dan Guru),

tahun 1994 sampai pertengahan 2002 dengan perluasan peran menjadi BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan) yang personilnya terdiri atas orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Sejak pertengahan 2002 wadah tersebut bertambah peran dan fungsinya sekaligus perluasan personilnya yang terdiri atas orang tua dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan yang tidak hanya di sekitar sekolah. Perbedaan yang prinsip antara BP3 dengan Komite Sekolah adalah dalam peran fungsi, keanggotaan serta dalam pemilihan dan pembentukan kepengurusan.

Secara formal hampir semua sekolah telah memiliki perangkat komite sekolah sebagai wakil masyarakat dalam membantu program pendidikan di sekolah. Kehadiran komite sekolah menunjukkan perannya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan, baik program pembangunan fisik maupun non-fisik seperti program pembelajaran di kelas. Namun demikian, dalam perjalanan kiprah komite sekolah belum sepenuhnya melaksanakan peran dan fungsi sebagai organisasi mitra sekolah dalam membantu program pendidikan sesuai dengan rencana.

Peranserta masyarakat sebagai kekuatan kontrol dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah menjadi sangat penting. Di bidang pendidikan partisipasi ini lebih strategis lagi, sebab partisipasi ini bisa menjadi kekuatan tersendiri dalam mengontrol pelaksanaan dan kualitas pendidikan di sekolah. Apalagi pada saat ini Kemendiknas menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu ide-ide atau gagasan-gagasan tentang perlunya sebuah lembaga yang berperan sebagai lembaga yang menjadi mitra sekolah yang menyalurkan partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan yang sangat nyata dan tak terhindarkan seperti Komite Sekolah ini.

Apabila komite sekolah bisa dijalankan berarti proses dan pelaksanaan pendidikan di sekolah akan berjalan sesuai prinsip demokrasi. Hal ini berarti lingkungan sekolah menjadi laboratorium dan contoh mikro dan realisasi masyarakat madani. Dengan Demikian masyarakat sekolah berarti menjalankan fungsi legislatif-eksekutif, partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Jelas sekali bahwa memfungsikan MBS, MBM dan Komite Sekolah merupakan upaya demokrasi pendidikan yang menjadikan pendidikan berakar pada masyarakat yang tentunya mempunyai sustainabilitas yang handal.

Berkaitan dengan kualitas pendidikan beberapa indikator keberhasilan pendidikan perlu dimonitor sebagai kinerja Komite Sekolah. Kualitas dapat diukur dari seberapa efektif pengelolaan system pendidikan melalui MBS, dapat memberikan efek terhadap prestasi belajar siswa secara optimal yang paling tepat untuk mengukur kualitas pendidikan sebenarnya adalah hasil evaluasi ujian akhir yang diukur melalui ujian Akhir Nasional, namun kegiatan monitoring yang dilakukan itu tidak secara langsung mengukur Output pendidikan dalam pengertian prestasi belajar siswa secara akademis.

Beberapa indikator mutu pendidikan yang dapat dipantau adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan persentase lulusan terhadap jumlah murid tingkat akhir yang mengikuti ujian.
- b. Pendayagunaan sarana-prasarana belajar yang lebih optimal (seperti buku pelajaran, Perpustakaan, alat pelajaran, media pendidikan, dan pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar).
- c. Peningkatan kualitas guru yang diukur dari rata-rata tingkat pendidikan guru dan jumlah penataran yang diikuti.
- d. Peningkatan prestasi siswa baik akademis maupun non akademis.

SIMPULAN

Peran komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di sekolah sangat menonjol, contohnya dalam menyusun RAPBS dan besaran biaya-biaya dalam setiap program pendidikan yang lain. Peran komite sekolah sebagai pendukung, baik yang berupa materi maupun non materi. Hal ini merupakan patner yang sangat efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SDN 014 Kempas JayaKecamatan KempasKabupaten Indragiri Hilir Riau, karena komite sekolah selalu mendukung dan mencarikan jalan keluar pada saat sekolah akan membangun atau menambah sarana dan prasarana.

Peran komite sekolah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Pada peran ini Komite SDN 014 Kempas JayaKecamatan KempasKabupaten Indragiri Hilir Riaucukup maksimal mengontrol kebijakan sekolah dan proses perencanaan pendidikan, terbukti sampai saat ini tidak ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam mengelola anggaran dari orang tua maupun dari pemerintah. Peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat cukup baik. Komite SDN 014 Kempas JayaKecamatan KempasKabupaten Indragiri Hilir Riauselalu aktif dalam setiap pertemuan dengan wali siswa terutama dalam bantuan dana incidental yang disesuaikan dengan kemampuan rata-rata masyarakat setempat.

Komite SDN 014 Kempas JayaKecamatan KempasKabupaten Indragiri Hilir Riaumerupakan komponen system dari sekolah, hal ini disebabkan sekolah merupakan suatu system. Apabila semua system bekerja dengan baik maka output dan outcome yang dihasilkan akan baik.

Peran komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu cukup membanggakan. Mutu akademis menunjukkan selama tiga tahun terakhir

tingkat kelulusan siswa mencapai 100% dan memperoleh nilai cukup tinggi. Hal ini dicapai tidak lepas dan dukungan komite sekolah yang telah memberikan bantuan dana untuk mendukung kegiatan bimbingan berajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cetakan ke-12.
- Armida S., Alisyahbana, 1999. *Manajemen Otonomi Daerah: Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah*. Makalah disampaikan pada seminar nasional "Solusi dan Evaluasi Kritis Masa Depan Ekonomi Indonesia" diselenggarakan Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Pasundan. Bandung 20 Juli 1999.
- Azra, Azyumardi. *Inovasi Kurikulum, edisi 01/tahun 2003*. Strategi Pengembangan Kurikulum Madrasah Aliyah Dalam Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan.
- Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kegiatan Peningkatan Kegiatan dan Usaha Manejemen Pendidikan.
- Djauzak, Ahmad. *Petunjuk Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekotah Dasar*. Jakarta: Depdikbud, 1996.
- Fatah, Nanang. *Konsep Management Berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2003.
- Hasbullah. 2006. *Otonomi Pendidikan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia 1991.

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 044/U/2002 Tanggal 2
April 2002 tentang *Dewan
Pendidikan dan Komite Sekolah*.
- Kota Jepara Blog, Antara Keinginan dan
Harapan, 2011 (Sumber:
[http://KotaJeparaBlog.Wordpress.
com](http://KotaJeparaBlog.Wordpress.com))
- Pantjastuti. Sri Renani, dkk. 2009. *Komite
Sekolah, Sejarah dan Prospeknya di
Masa Depan*. Yogyakarta: Hikayat
Publishing.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2010 tentang
*Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan*.
- Peran Komite Sekolah Belum Optimal.
(www.MedanBisnis.com), 2011.
- Suparlan. Diperlukan Kreativitas Komite
Sekolah/Madrasah.
www.google.com, 2010.
- Swima. Komite Sekolah/Madrasah Jangan
Jadi Corong. www.google.com,
2010
- Sumber :
- [www.google.com/EfektifitasOrga
nisasi2010](http://www.google.com/EfektifitasOrganisasi2010).
- Sumber :
- [www.google.com/KumpulanThes
isPendidikan2011](http://www.google.com/KumpulanThesisPendidikan2011).
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Tesis.
UWP Surabaya.
- Tilar, HAR. 2000. *Paradigma Baru
Pendidikan Nasional*. Jakarta. Rineka
Cipta.
- Tamrin. Efektifitas Kinerja Komite
Sekolah dan Dewan Pendidikan
Kota Padang. 2011 (Presentasi
makalah Seminar Pendidikan
Sumber: www.google.com)
- Umaedi. *Manajemen Mutu Berbasis
Sekolah/Madrasah (MMBS M)
CEQM*, 2004.